

OPTIMISME PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Siswandaru K

Purwaningdyah Murti Wahyuni

Universitas Terbuka
siswandaru@ut.ac.id

Abstract: *World Economic Forum Global Competitiveness Report launched in the year 2012-2013, Indonesia's economic competitiveness is still ranked 50. The Government of Indonesia is the toughest challenge in the infrastructure sector, the government has designed an Indonesian Economic Development Acceleration Program set forth in Presidential Decree number: 32 in 2011 on the ratification of the Master Plan to Accelerate Economic Development in Indonesia. This means that the absolute requirement of implementation of Indonesia's Economic Development economic corridor-based nodes each region is the availability of public works infrastructure, transportation, energy and telecommunications are adequate and appropriate to the needs of each region. This paper aims to describe and explain how infrastructure can meet the challenges and opportunities facing the development of the global economy so as to make Indonesia a more competitive economy and put the country Indonesia as a developing country that needs to be taken into account in the global economy.*

Keywords: *development, infrastructure, economy*

Abstrak: *World Economic Forum melansir dalam Global Competitiveness Report tahun 2012-2013, competitiveness ekonomi Indonesia masih berada di peringkat 50. Tantangan terbesar Pemerintah Indonesia adalah di sektor infrastruktur, pemerintah telah mendesain suatu Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor : 32 tahun 2011 tentang Pengesahan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ini artinya bahwa syarat mutlak implementasi Pembangunan Ekonomi Indonesia berbasis simpul koridor ekonomi setiap wilayah adalah tersedianya infrastruktur public works, perhubungan, energi dan telekomunikasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat menjawab tantangan dan peluang pembangunan ekonomi global yang dihadapi sehingga mampu menjadikan perekonomian Indonesia menjadi lebih kompetitif dan menempatkan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang perlu diperhitungkan dalam perekonomian global.*

Kata Kunci : *pemerintah, infrastruktur, ekonomi*

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, indikator perekonomian domestik telah mendukung terciptanya iklim bisnis yang kondusif bagi perkembangan industri di Indonesia.

Diantara beberapa indikator perekonomian tersebut adalah tingkat inflasi selama tahun 2010 tercatat sebesar 7,0%, tahun 2011 tercatat sebesar 4,29% dan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2012 tercatat terkendali sebesar 2,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 tercatat sebesar 6,1%, tahun 2011 sebesar 6,4% dan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2012 tercatat sebesar 6,4%.

Selain itu, selama tahun 2012 setelah pada 12 Januari 2012 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,0%. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 9 Februari 2012 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Keputusan ini diambil sebagai langkah lanjutan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi global, dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Dengan keputusan BI Rate ini, koridor bawah dan atas suku bunga operasi moneter Bank Indonesia masing-masing menjadi 3,75% untuk fasilitas simpanan o/n (deposit facility rate) dan 6,75% untuk fasilitas pinjaman o/n (lending facility rate). Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 13 September 2012 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dipandang masih konsisten dengan tekanan inflasi yang rendah dan terkendali sesuai

dengan sasaran inflasi tahun 2012 dan 2013, yaitu $4,5\% \pm 1\%$.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal I dan II/2012 masing-masing sebesar 6,3% dan 6,4% merupakan modal untuk menggapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode selanjutnya. Apabila laju perekonomian pada kuartal III dan IV/2012 minimal berada di level 6,6% sasaran pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam APBN-P 2012 sebesar 6,5% dapat tercapai. Pada semester II tahun 2012, pertumbuhan PDB sektoral diperkirakan didominasi oleh sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 8,0-8,2 %.

Kondisi perekonomian Indonesia yang baik tersebut juga telah diakui oleh perusahaan pemeringkat dunia yaitu Fitch dan Moody's dengan diberikannya kriteria *investment grade* bagi Indonesia sejak tahun 2011. Namun demikian, perbaikan peringkat tersebut belum cukup untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi kompetitif, setidaknya untuk dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh dunia global, antara lain :

- a. Membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi, dengan memanfaatkan bahan baku, energi dan tenaga kerja yang berlimpah (memanfaatkan bonus demografi);
- b. Menciptakan keseimbangan pembangunan *frontland* dan *hinterland* ;
- c. Menciptakan skema investasi yang kompetitif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan mempertimbangkan peran Indonesia

yang semakin besar di perekonomian global baik keterlibatan di forum-forum global dan regional antara lain ASEAN, APEC, G-20 maupun dalam rangka melaksanakan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 menetapkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut, pembangunan infrastruktur mengambil peran strategis yang mampu menentukan keberhasilan pembangunan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul *"Optimisme Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur"* dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif analisis kuantitatif sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti dilansir oleh World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report tahun 2012-2013, competitiveness ekonomi Indonesia masih berada di peringkat 50, jauh di bawah Singapura yang menempati peringkat 2, Malaysia di peringkat 25, Brunei Darussalam di peringkat 28 dan Thailand di peringkat 38. Berdasarkan report tersebut tantangan terberat Pemerintah Indonesia adalah di sektor infrastruktur.

Presiden Republik Indonesia seperti dilansir oleh Indonesia Finance Today pada tanggal 28 Agustus 2012 dalam pembukaan Infrastructure Summit menyampaikan bahwa

dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia terdapat sejumlah permasalahan yang harus dihadapi antara lain kondisi geografis, kerawanan dan bencana alam, dan sumber pembiayaan yang tidak mudah diperoleh. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa tema utama permasalahan infrastruktur di Indonesia adalah *good intentions were plain for all to see – but signs of significant progress were few and far between*.

David Ray, Indll Facility Director dalam forum Indonesia Infrastructure Initiative Australia Indonesia Partnership mengungkapkan dalam paparannya menyampaikan pendapat dari Fauzi Ichsan pada saat peluncuran laporan Standard Chartered berjudul Indonesia : Infrastructure Bottlenecks tanggal 22 Februari 2011 yaitu *"Indonesia has the potential to achieve economic growth of up to 8%. However, so far economic growth has been sub-optimal due to infrastructure constraints". "About 6-7 years ago, the number one business hurdle in the real sector...was the rule of law and corruption. Currently the number one obstacle is inadequate infrastructure"*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 menetapkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut, pembangunan infrastruktur mengambil peran strategis yang mampu menentukan keberhasilan pembangunan Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 25 April 2012 menyampaikan bahwa MP3EI merupakan konsep tepat untuk akselerasi pembangunan, terutama infrastruktur. MP3EI mampu menunjukkan perencanaan infrastruktur yang lebih matang

pada tiap kawasan. Hal tersebut pada akhirnya akan menciptakan suatu konektivitas antar kawasan. Adanya MP3EI akan mampu menunjukkan bahwa perencanaan yang dimiliki pemerintah sudah lebih matang. Pada akhirnya tercipta suatu hubungan antar-kawasan.

Pemerintah setiap tahunnya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur yang meningkat selama 5 tahun terakhir.

Dalam UU APBN tahun 2010 porsi anggaran infrastruktur adalah sebesar 110,1 Triliun, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp139,4 Triliun, dan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp168 Triliun. Sedangkan dalam RAPBN 2013 alokasi belanja infrastruktur meningkat menjadi lebih dari Rp170 Triliun.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas bahwa Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp755 triliun mulai tahun ini sampai 2014 untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dari jumlah itu sebesar Rp544 triliun berasal dari pemerintah, dan sisanya Rp211 triliun dari kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP). Adapun alokasi pembangunan infrastruktur, sebesar Rp143 triliun digunakan untuk membangun jalan, Rp138 triliun untuk membangun jalur kereta api, dan Rp49 triliun untuk pelabuhan laut. Untuk membangun bandara dialokasikan dana sebesar Rp14 triliun, kelistrikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp288 triliun, infrastruktur keairan Rp8 triliun, telekomunikasi Rp102 triliun, serta lain-lain Rp13 triliun. Alokasi untuk koridor Jawa adalah sebesar Rp213 triliun (28% dari total

anggaran), dan sisanya sebesar 72% atau sekitar Rp542 triliun untuk koridor lain, seperti Koridor Sumatra, Koridor Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTB serta Koridor Papua Maluku.

Selain Pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur, unsur lain yang juga memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Urgensi keterlibatan semua komponen pertumbuhan ekonomi nasional tercermin dari total indikasi investasi sepanjang 2011-2014 yang jumlahnya teridentifikasi mencapai sekitar Rp4.000 triliun. Kebutuhan dana sebesar itu tentu tidak akan dipenuhi seluruhnya dari kas internal negara (APBN) sehingga pembiayaannya perlu didistribusikan baik kepada BUMN, Pemerintah maupun Swasta.

BUMN maupun swasta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan investasi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang sehat dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi (*debottlenecking*). BUMN sebagai salah satu kontributor utama dalam MP3EI jelas memiliki potensi peran yang besar dalam melaksanakan berbagai proyek untuk mempercepat dan memperluas pembangunan nasional tidak kurang BUMN telah menyiapkan pembiayaan investasi senilai Rp 836 triliun dari tahun 2011-2014 sebagai bentuk nyata dukungan BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. *Ground-breaking* proyek infrastruktur dalam MP3EI yang dikerjakan oleh BUMN dalam MP3EI pada semester 1-2011 hingga semester 1-2012 diproyeksikan sebesar Rp 126,66 triliun dan USD 643 juta.

Beberapa contoh proyek-proyek infrastruktur BUMN yang memegang

peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain : pengembangan bandara Soekarno Hatta, pengembangan bandara Ngurah Rai, pembangunan bandara Kualanam, pembangunan jalan tol Benoa Bali, pembangunan terminal petikemas Kalibaru, pembangunan terminal petikemas Belawan, pembangunan jalur *fiber optic*, pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi di seluruh wilayah Indonesia, dan lain-lain.

Proyek-proyek infrastruktur BUMN tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang dikembangkan oleh BUMN. Transformasi bisnis BUMN Konstruksi Utama Karya menjadi BUMN Jalan Tol untuk mempercepat pengerjaan proyek-proyek MP3EI di Koridor Ekonomi Sumatera. Dengan kepemilikan 100% sahamnya oleh pemerintah, Utama Karya akan menerima penugasan pemerintah membangun proyek-proyek jalan tol, meskipun secara finansial dianggap belum menguntungkan (*financially unfeasible*), beberapa konsorsium BUMN seperti Jasa Marga, Utama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Angkasa Pura juga bersinergi membangun proyek jalan tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Tanjung Benoa yang nantinya akan menjadi jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas laut, PT Angkasa Pura I juga akan mengembangkan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain untuk menjawab kebutuhan jalan dan bandara yang memang sudah mendesak, kolaborasi beberapa BUMN Karya tersebut juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan APEC 2013 di Bali. Lebih istimewa lagi, dana yang digunakan sama sekali tidak berasal dari APBN. Tidak hanya berkonsentrasi di Jawa dan Bali, atas nama pemerataan pembangunan, BUMN pun berkiprah lebih jauh membangun kawasan Indonesia bagian Timur. Di Papua, BUMN memiliki tiga proyek strategis seperti *Sorong*

West Pacific Hub Port, PLTA di Yetni dan Beliem

Atas, serta Proyek Sagu milik PT Perhutani. Sementara di Kalimantan Timur, pabrik pupuk Kaltim V, telah diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden pada akhir Oktober lalu bersamaan dengan *ground-breaking* enam proyek MP3EI lain dengan total nilai investasi sekitar Rp 19 triliun. Pabrik pupuk Kaltim V akan menjadi pabrik urea dan amoniak terbesar di Asia Tenggara.

SIMPULAN

Momentum yang baik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung dengan komitmen yang kuat untuk pembangunan infrastruktur baik oleh Pemerintah maupun BUMN dan pihak lainnya, setidaknya perlu didukung melalui perbaikan iklim investasi dalam sektor infrastruktur. Beberapa permasalahan institusional maupun regulasi setidaknya perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah agar momentum dan komitmen tersebut tetap dipertahankan.

Permasalahan institusional dalam pembangunan infrastruktur yang didefinisikan oleh David Ray, Indll Facility Director dalam forum Indonesia Infrastructure Initiative Australia Indonesia Partnership yaitu keengganan untuk pemeliharaan rutin infrastruktur, kegagalan dan kesalahan dalam desain, permasalahan dalam penentuan prioritas penyelesaian permasalahan, pendanaan pemerintah yang umumnya hanya tahunan dan kesulitan dalam merencanakan *multi years financing*, dan lain-lain. Sementara permasalahan regulasi dalam pembangunan infrastruktur sebagian besar disebabkan oleh kesulitan dalam pembebasan lahan khususnya untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum, belum sinkronnya kebijakan antar sektor sehingga juga menjadi *bottlenecking* dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-

lain. Permasalahan-permasalahan tersebut hendaknya menjadi prioritas penyelesaian Pemerintah untuk mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Simpulan yang dapat diambil dari permasalahan diatas adalah perlunya peningkatan percepatan infrastruktur diseluruh pelosok wilayah Indonesia, dimana hal ini tentunya amat sangat membutuhkan biaya yang cukup besar namun dengan harapan dan optimisme dari semua unsur dimana pada saatnya nanti seluruh wilayah Indonesia dapat mengalami kesiapan majemuk yang menyeluruh diseluruh pelosok negeri untuk menjadi negara Indonesia yang maju dan kuat disegala bidang, serta bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011
tanggal 20 Mei 2011
- UU nomor 17 tahun 2007 *tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025.*
- UU APBN tahun 2010
- World Economic Forum *dalam Global
Competitiveness Report tahun 2012-2013.*